

Pengaruh Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Obama dalam Proses Negosiasi antara Kolombia dengan FARC

Prettya Nur Kartikasari

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

E-mail: prettyasari@gmail.com

Abstrak

Amerika Serikat sebagai negara *superpower* memiliki pengaruh besar dalam dinamika hubungan internasional sehingga tidak jarang tercipta hubungan interdependen antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain khususnya negara yang rawan konflik dan membutuhkan bantuan asing. Kolombia termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat akibat adanya tumpang tindih kepentingan antara kedua negara tersebut. Dari awal terbentuknya hubungan antara kedua negara, Amerika Serikat menerapkan kebijakan pemberian bantuan asing seperti bantuan dana, teknis maupun militer terhadap pemerintah Kolombia yang umumnya digunakan untuk mencapai resolusi konflik dengan musuh terutama kelompok-kelompok pemberontak seperti FARC. Tulisan ini pada dasarnya menganalisis upaya Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Obama dalam membantu proses perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan kelompok gerilya FARC. Kontribusi Amerika Serikat dalam proses perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC ini dianalisis melalui lensa teori resolusi konflik yaitu *peacemaking* dan *peacebuilding*. Administrasi Obama berpartisipasi aktif melalui pengambilan peran sebagai mediator di proses *peacemaking* serta berkontribusi dalam proses *peacebuilding* melalui implementasi *Plan Colombia* khususnya menyediakan bantuan di program-program bidang keamanan, pemberantasan narkoba, politik, ekonomi dan keadilan sosial. Tulisan ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor penentu yang membantu administrasi Obama berhasil dalam mencapai perwujudan konsolidasi perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC.

Kata kunci: Amerika Serikat, Kolombia, FARC, *Plan Colombia*, *peacemaking*, *peacebuilding*

The United States as a superpower has a great influence on the dynamics of international relations so that it is not uncommon to create interdependent relations between the United States and other countries, especially countries that are conflict-prone and require foreign assistance. Colombia is included as one of the countries that have close relations with the United States due to overlapping interests between the two countries. From the initial formation of relations between the two countries, the United States adopted a policy of providing foreign assistance such as financial, technical and military assistance to the Colombian government which is generally used to achieve conflict resolution with the enemy, especially rebel groups such as the FARC. This paper basically analyzes the efforts of the United States under the leadership of President Obama in assisting the peace process between the Colombian government and the FARC guerrilla group. The contribution of the United States in the peace process between the

Colombian government and the FARC was analyzed through the lens of the conflict resolution theory of peacemaking and peacebuilding. The Obama Administration actively participates through taking a role as a mediator in the peacemaking process and contributes to the peacebuilding process through the implementation of Plan Colombia in particular providing assistance in programs in the fields of security, drug eradication, politics, economics and social justice. This paper also explains the determinants that helped the Obama administration succeed in achieving the realization of a consolidated peace between the Colombian government and the FARC.

Keywords: United States, Colombia, FARC, Plan Colombia, peacemaking, peacebuilding

Pendahuluan

Konflik antara pemerintah Kolombia dengan FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) telah berlangsung selama 52 tahun dan terhitung sekitar 220.000 korban meninggal dunia, 7,65 juta korban kekerasan dan lebih dari enam juta warga Kolombia terlantar (Strasser 2016). FARC merupakan kelompok gerilya sayap kiri yang membiayai operasinya melalui perdagangan obat-obatan terlarang, tindakan penculikan, pemerasan dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Kelompok gerilya marxis FARC ini memiliki visi anti-imperialisme, oposisi terhadap kelas elit dan menyatakan diri sebagai perwakilan dari golongan miskin warga Kolombia. FARC secara resmi terbentuk sebagai organisasi pada tahun 1964 dengan tujuan utama menggulingkan kesenjangan sosial sistemik di Kolombia (Otis 2014,3). FARC kurang lebih mengantongi 50 juta dolar Amerika per tahun atas perdagangan koka di wilayah kendalinya dan 90 juta dolar dari pergerakan transaksi kokain di seluruh dunia. Laporan PBB dari tahun 2012 menyatakan bahwa FARC menguasai hampir 2/3 dari jumlah total produksi kokain di Kolombia dan 60 persen dari total perdagangan narkoba di negara-negara Andes (Murphy & Acosta 2013).

Kontrol FARC dalam bidang perdagangan narkoba ilegal dan inkompetensi pemerintah Kolombia ini tentunya mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Pada 1970-1980, Kolombia ialah produsen kokain utama di dunia dan tidak sedikit dari kokain tersebut diselundupkan ke Amerika Serikat. Pada tahun 1975, terdapat lebih dari 4000 kg kokain diselundupkan ke Amerika Serikat dari Kolombia. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat menganggap serius permasalahan FARC dan berusaha membantu pemerintah Kolombia untuk menyelesaikan konflik dengan organisasi gerilya ini. Posisi resmi Amerika Serikat ialah menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah Kolombia dalam memperkuat institusi demokratisnya, mempromosikan penghormatan atas penjaminan hak asasi manusia & *rule of law*, mendorong pembangunan

sosio-ekonomi, menangani kebutuhan kemanusiaan serta menghentikan ancaman dari terorisme beserta perdagangan narkoba (US Department of State 2015).

Amerika Serikat telah berusaha membantu pemerintah Kolombia untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui berbagai pemberian bantuan dari bantuan militer, asistensi kemanusiaan serta bantuan dana. Salah satu program kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berurusan dengan pemberian bantuan asing ini ialah *Plan Colombia*. *Plan Colombia* dimengerti sebagai program yang memberikan bantuan militer, dana dan diplomatik oleh Amerika Serikat terhadap pemerintah Kolombia dalam rangka melawan kartel narkoba, kelompok-kelompok gerilya sayap kiri maupun kelompok-kelompok paramiliter sayap kanan. *Plan Colombia* ini dibentuk pada tahun 1999 dan berlangsung hingga sekarang namun implementasinya di masing-masing administrasi cukup berbeda karena setiap Presiden memiliki perspektif tersendiri dalam menangani isu antara Amerika Serikat dengan Kolombia.

Di era Presiden Obama, Amerika Serikat tetap mendukung dan mengerahkan segala bantuannya terhadap upaya perdamaian antar pemerintah Kolombia dengan FARC. Saat pidatonya di PBB, Presiden Barack Obama yakin bahwa Amerika Serikat akan membantu Kolombia dalam mengakhiri perang terlama di Amerika Latin. Bahkan presiden Kolombia, Juan Santos di wawancaranya dengan majalah TIME menyatakan bahwa Presiden Obama merupakan salah satu tokoh yang pertamakali mengetahui dan mendukung niatnya untuk segera mewujudkan perdamaian (Otis 2016). Namun pada kenyataannya, banyak pihak yang masih ragu-ragu dengan kapabilitas Presiden Obama terkait isu kebijakan luar negeri mengingat kegagalannya dalam isu 'red line' Syria maupun dampak dari keputusan intervensinya di Libya. Di kasus resolusi konflik ini, pendekatan administrasi Obama terkait konflik antar pemerintah Kolombia dengan FARC terbukti membuahkan hasil. Pada Oktober 2012, Presiden Manuel Santos dengan pemimpin FARC Rodrigo Londono mengumumkan adanya pembicaraan yang mengarah pada perdamaian antar kedua pihak. Setelah dua tahun lamanya, Presiden Santos dan Rodrigo menetapkan elemen-elemen terakhir perjanjian perdamaian di Havana dan menandatangani perjanjian tersebut pada 26 September di Cartagena (BBC News 2016). Perjanjian ini menandai berakhirnya konflik antara pemerintah Kolombia dengan FARC dan perubahan status FARC dari kelompok gerilya militer menjadi organisasi politik.

Pada Oktober 2016, diadakan referendum terhadap warga Kolombia mengenai perjanjian perdamaian antar FARC dengan pemerintah Kolombia namun rakyat Kolombia memilih tidak dengan suara sebanyak 50,21 persen terhadap perjanjian damai ini. Paska kegagalan referendum, pemerintah Kolombia tetap melaksanakan penandatanganan dan ratifikasi perjanjian damai yang sudah direvisi melalui Kongres Kolombia. Ratifikasi perjanjian damai yang sudah direvisi ini dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2016 dengan suara 75-0 di Senat dan suara 130-0 di Majelis Perwakilan (Beittel 2016).

Hasil dari ratifikasi perjanjian damai tersebut dapat dilihat dari beberapa statistik seperti data menunjukkan bahwa tingkat kekerasan di Kolombia pada tahun 2017 mencapai tingkat terendahnya sejak 1973 dan terdapat penurunan tingkat penculikan warga sebesar 90% sejak tahun 2002. Pada 2017, sekitar 11.000 anggota FARC telah dilucuti senjatanya dan didemobilisasi menjadi warga sipil (Beittel 2018,12). Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengeluarkan laporan (2012) yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi koka di Kolombia dari 167.000 hektar pada tahun 2007 menjadi 78.000 hektar pada tahun 2012.

Keberhasilan administrasi Obama dalam membantu proses perwujudan konsolidasi perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC ini kemudian dianalisis melalui lensa teori teknik resolusi konflik. Perspektif resolusi konflik ini memiliki metode-metode yang dikenal sebagai 4p atau *peacekeeping*, *peacemaking*, *peacebuilding* dan *peace settlement*. Tulisan ini memfokuskan pada upaya pemerintahan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama dalam membantu proses perdamaian antar Kolombia dengan FARC melalui proses *peacemaking* dan *peacebuilding*. Administrasi Obama berhasil membantu mewujudkan ratifikasi perjanjian damai antara FARC dengan pemerintah Kolombia melalui proses *peacemaking* yang dilakukan secara diplomasi dan mediasi. Proses perdamaian antara Kolombia dengan FARC juga dibantu oleh pelaksanaan kebijakan administrasi Obama dalam upaya *peacebuilding* yang meliputi penguatan mekanisme pemerintahan dan institusi demokrasi, pengembangan infrastruktur ekonomi, penjaminan keamanan beserta perwujudan keadilan sosial.

Sejarah Hubungan antara Kolombia dengan Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang atas upayanya dalam membantu resolusi konflik antara FARC dengan pemerintahan Kolombia. Hubungan diplomatik antar

Kolombia dengan Amerika Serikat sendiri secara resmi dimulai pada tahun 1822 dan Kolombia termasuk sebagai salah satu negara penerima bantuan asing terbesar dari Amerika Serikat dari tahun 1960-an hingga 1970-an. Fokus hubungan antara Amerika Serikat dan Kolombia pada tahun 1990-an berkembang menjadi lebih pada upaya bantuan asing dan kebijakan militer khususnya operasi melawan perdagangan narkoba serta menghalang kelompok gerilya maupun paramiliter. Pada tahun 1996, Senator Patrick Leahy mensponsori "*Leahy Law*". Hukum ini menerapkan standar hak asasi manusia terhadap proses pemberian bantuan asing khususnya di bidang penuntasan perdagangan narkoba dan melarang penggunaan bantuan oleh anggota militer yang diduga melanggar hak asasi manusia kecuali pemerintah penerima mengambil langkah-langkah efektif dalam membawa anggota yang bertanggung jawab ke pengadilan (Haugaard et al.,2005,12).

Kebijakan asing Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Clinton dengan pemerintah Kolombia pada umumnya berfokus pada upaya bantuan asing dan operasi militer. Presiden Bill Clinton mengirim 40,5 juta dolar sebagai paket bantuan darurat terhadap Kolombia pada tahun 1996 yang dilanjutkan dengan pembentukan *Plan Colombia*. Pada Juli 2000, *Plan Colombia* akhirnya disetujui Kongres dengan administrasi Clinton mengirim 860 juta dolar yaitu sebesar 632 juta digunakan untuk kegiatan militer dan bantuan polisi serta 227 juta untuk kegiatan umum seperti pembangunan ekonomi, program pengungsi, jaminan HAM dan keadilan. Namun program *Plan Colombia* di era Clinton ini dinilai masih belum berhasil dalam mencapai tujuannya dikarenakan oleh berbagai faktor dari bentuknya masih sederhana, terdapat beberapa celah hukum yang mempengaruhi pelaksanaan program ini dan pelaksanaannya masih jauh dari pemenuhan persyaratan jaminan HAM terutama di zona-zona konflik. Banyak pihak mengkritik penggunaan dana yaitu hampir 75% digunakan hanya untuk keperluan militer ditambah keengganan komunitas internasional untuk ikut terlibat yang semakin mempersulit pelaksanaan program *Plan Colombia*.

Pada administrasi George W. Bush, Amerika Serikat telah menghabiskan sebanyak 7,7 milyar dolar Amerika dalam *Plan Colombia* namun pemerintah Kolombia masih belum dapat melawan pihak gerilya maupun pedagang narkoba secara efektif (Mordogan 2007,42). Tema hubungan antar Amerika Serikat dengan Kolombia di era administrasi George W. Bush ini cenderung militeristis dan kegiatan "*narco-terrorism*" dijelaskan sebagai persatuan antar perang anti

narkoba dengan perjuangan anti gerilya. Presiden Bush Jr. kemudian mengusulkan proposal yang dinamakan '*Andean Initiative*' yaitu perluasan dari *Plan Colombia* dengan tujuan penerapan strategi keamanan tidak hanya di aspek militer namun juga mendukung unit polisi lokal dalam perang melawan kartel narkoba di wilayah Andean. Namun tindakan institusi militer Amerika Serikat dengan militer Kolombia di administrasi Bush ini banyak dikritik karena meningkatnya jumlah kasus pelanggaran '*Leahy Law*' terutama di aspek jaminan HAM dan koordinasi dengan kelompok-kelompok paramiliter. Masalah besar lainnya yang memperburuk hubungan antar Kolombia dengan Amerika Serikat ialah ketika Komando Selatan Amerika Serikat dan pemerintah Uribe melakukan kesalahan militer besar yang dikenal sebagai *Plan Patriota* (Haugaard et al.,2005,16). Kelompok gerilya FARC khususnya mengalami momentum politik karena perannya sebagai aktor utama yang berhasil melawan kombinasi komando militer Amerika Serikat dengan Kolombia tersebut.

Pada tahun 2008, perspektif pemerintah Amerika Serikat terhadap dukungannya dalam *Plan Colombia* terutama mengenai alokasi dana telah berubah. Administrasi Obama meyakini bahwa program *Plan Colombia* sifatnya tidak seimbang yaitu terlalu berfokus pada bidang keamanan (militer dan kepolisian) sedangkan program-program "*soft side*" seperti program pengembangan sosial dan ekonomi dihiraukan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap 75%/25% proporsi alokasi dana tersebut. Sejak tahun 2008, bantuan dana *Plan Colombia* dari Amerika Serikat kepada Kolombia secara perlahan menurun jumlahnya karena adanya pengetatan anggaran dana bantuan asing dan nasionalisasi program-program yang terkait dengan *Plan Colombia* tersebut. Di akhir tahun kepemimpinannya, Presiden Santos melaksanakan kunjungan resmi negara ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Obama dan merayakan 15 tahun lamanya implementasi *Plan Colombia*. Presiden Obama di pidatonya kemudian mengumumkan kerangka kerjasama bilateral baru yang bernama *Peace Colombia* atau *Paz Colombia*. *Peace Colombia* adalah program asistensi dengan bantuan dana sebesar 450 juta dolar Amerika yang bertujuan untuk memudahkan proses perdamaian antar pemerintah Kolombia dengan FARC. *Peace Colombia* pada dasarnya memfokuskan bantuan asing kepada tiga isu antara lain konsolidasi keamanan serta upaya anti narkoba sekaligus reintegrasi anggota-anggota FARC kembali dalam masyarakat umum, memperluas keberadaan institusi negara dalam rangka memperkuat *rule of law* dan ekonomi pedesaan terutama di zona wilayah konflik serta mempromosikan keadilan maupun jasa pelayanan lainnya bagi para korban (Beittel 2016).

Proses *Peacemaking* antara Pemerintah Kolombia dengan FARC dan Peran Amerika Serikat sebagai Mediator dalam Tahap Negosiasi

Dalam proses *peacemaking* ini, terdapat tiga tahap dasar yaitu tahap diagnosis, tahap formulasi dan tahap detail. Di tahap diagnosis, dilaksanakan proses penentuan ZOPA (*Zone of Possible Agreement*) untuk mengetahui kepentingan masing-masing pihak yang terlibat konflik supaya proses resolusi konflik berjalan lancar dan efektif. Objektif utama FARC pada dasarnya menyangkut dua keluhan warga di desa-desa Kolombia yaitu reformasi tanah dan jaminan untuk partai politik sayap kiri. FARC juga memiliki kepentingan dalam bidang politik yaitu keinginan untuk memiliki suara dan representasi resmi di sistem pemerintahan Kolombia. Pada tahun 1985, FARC berupaya untuk memasuki sistem politik melalui pembentukan partai politik yang dikenal sebagai Union Patriótica (UP). Namun eksistensi UP ini berlangsung singkat dan kontroversial yaitu hampir 3000 anggota partainya dibunuh serta pada tahun 1986-1990, kandidat-kandidat presidennya juga dibunuh. Kepentingan FARC lainnya yang tidak kalah penting ialah jaminan amnesti khususnya meningkatkan kualitas kondisi para tahanan FARC dimana terdapat 3400 anggota FARC ditahan dalam penjara-penjara di Kolombia (Nylander et al.,2018,6).

Pemerintah Kolombia juga memiliki berbagai kepentingan yang wajib dibicarakan dan diwujudkan melalui proses negosiasi dengan FARC. Kepentingan utama administrasi Santos ialah untuk mengakhiri konflik bersenjata antar pemerintah Kolombia dengan FARC. Kepentingan pemerintah Kolombia lainnya ialah demobilisasi dan pelucutan senjata FARC khususnya ranjau darat. Pemerintah Kolombia melaporkan bahwa lebih dari 11.000 warga Kolombia terluka atau meninggal dunia akibat ranjau darat sejak 1990 dan sekitar setengah dari 32 negara bagian di Kolombia memiliki wilayah ranjau darat aktif (Veillette 2016,2).

Negosiasi antar FARC dengan Kolombia juga penting tidak hanya bagi keamanan domestik namun juga bagi komunitas internasional. Amerika Serikat khususnya mengaplikasikan berbagai kebijakannya terhadap isu ini karena laju narkoba terbesar berasal dari Kolombia. Amerika Serikat juga menggunakan faktor stabilitas regional sebagai justifikasi kebijakannya di wilayah Amerika Latin khususnya Kolombia mengingat perdagangan narkoba ilegal, pencucian uang dan pemberontakan bersenjata memiliki efek destabilisasi wilayah regional.

Di tahap formulasi, dilaksanakan proses negosiasi poin-poin kesepakatan antara pemerintah Kolombia dan FARC dengan Amerika Serikat berperan sebagai mediator. Proses negosiasi

perdamaian di Kolombia secara resmi terbagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan pembicaraan rahasia (2010-2011), eksplorasi pembicaraan rahasia (2012), negosiasi publik dan formal (2012-2016) (Quintana 2016,2). Pada Agustus 2012, Presiden Juan Manuel Santos mengumumkan bahwa administrasi pemerintahannya telah terlibat dalam eksplorasi pembicaraan damai dengan FARC. Pembicaraan formal antar kedua pihak ini dimulai di Oslo pada 18 Oktober 2012 yang kemudian berlanjut di Havana pada 3 November 2012 dimana pembicaraan tersebut berlangsung hingga 50 putaran diskusi. Pembicaraan ini dihadiri delegasi FARC, mantan Menteri, jenderal militer, jenderal polisi, presiden *National Business Council*, kepala negosiator dan komisioner perdamaian. Selain perangkat pemerintah, Presiden Santos juga dinasehati oleh empat individual asing dalam proses diskusi di Kuba ini yaitu Jonathan Powell dari Inggris, Joaquin Villalobos dari El Savador, William Ury dari Amerika Serikat dan Shlomo Ben Ami dari Israel (Carlin 2016).

Tim negosiasi Santos dengan perwakilan FARC akhirnya menyetujui atas kerangka diskusi untuk sesi pembicaraan yaitu terdapat enam tema penting antara lain kebijakan lahan dan pembangunan pedesaan, partisipasi politik FARC, mengakhiri konflik bersenjata meliputi reintegrasi anggota pemberontak ke dalam kehidupan sipil, produksi tanaman narkotika dan perdagangan obat terlarang, reparasi korban serta implementasi perjanjian damai termasuk ratifikasi dan verifikasi (Veillette 2016,18). Setelah negosiasi awal dilaksanakan, terdapat beberapa deklarasi berkaitan dengan enam syarat tersebut yang akhirnya diumumkan kepada rakyat Kolombia. Pada Mei 2013, pemerintah Kolombia mengeluarkan deklarasi pertama yaitu pembentukan *Land for Peace Fund* atau redistribusi lahan pertanian melalui dana serta memudahkan proses formalisasi kepemilikan tanah (Veillette 2016,20).

Proses negosiasi kedua antar pemerintah Kolombia dengan FARC kemudian dilaksanakan pada 10 Desember 2014 dimana pertemuan ini menghasilkan salah satu deklarasi terpenting yaitu deklarasi gencatan senjata. FARC mengumumkan gencatan senjata unilateral dengan rentang waktu yang tidak terbatas (Veillette 2016,25). Tahap negosiasi kedua ini juga menghasilkan pembentukan enam sub-komisi dan kelompok kerja yang berfungsi untuk menemukan solusi di masing-masing isu. Komisi-komisi ini membahas dan berusaha menemukan solusi bagi isu kesetaraan gender, resolusi konflik bersenjata, isu tahanan, penjaminan keamanan, isu warga hilang dan isu keadilan.

Administrasi Obama memiliki pengaruh besar terhadap proses negosiasi dan pembentukan poin-poin kesepakatan yang akhirnya dimasukkan kepada deklarasi-deklarasi kesepakatan antar Kolombia dengan FARC tersebut. Dari sisi Amerika Serikat, tidak hanya administrasi Obama namun juga beberapa individual dan organisasi terlibat dalam proses mediasi ini. William Ury sebagai analis yang berspesialisasi dalam siklus proses perdamaian dapat mengantisipasi di tahap apa dari prosedur yang akan terjadi kesulitan gerak maupun buntu sehingga keahliannya untuk menemukan titik tengah atas masalah terbukti sangat efektif bagi kelancaran proses negosiasi (Carlin 2016). Warga Amerika Serikat lain bernama Henry Acosta di tahun 2013 membantu membujuk Presiden Santos tetap terlibat dalam proses negosiasi ketika Presiden Santos tidak setuju dengan keinginan FARC untuk memperluas agenda yang telah disepakati (Acosta 2016). Di Februari 2015, Presiden Obama secara resmi menunjuk Bernie Aronson sebagai *Special Envoy* dalam proses perdamaian Kolombia (Veillette 2016,26). Terdapat lima hal yang dibawa Amerika Serikat ke dalam proses negosiasi antar FARC dengan pemerintah Kolombia yaitu intensifikasi upaya menemukan aset-aset FARC, secara formal meminta perincian atas senjata FARC sebelum demobilisasi, melanjutkan operasi anti perdagangan narkoba, menegaskan kembali komitmen untuk membawa tersangka pemberontak FARC yang diinginkan oleh Amerika Serikat ke pengadilan (perintah ekstradisi) dan mengarahkan perhatian kedua belah pihak terhadap isu isolasi atau pengecualian kaum-kaum minoritas (Quintana 2016,3).

Tahap mediasi formulasi ini akhirnya mencapai titik puncak pada tanggal 24 Agustus 2016 ketika tim negosiasi pemerintah Kolombia dan tim negosiasi FARC menandatangani perjanjian damai final di Havana setelah empat tahun lamanya proses negosiasi antar kedua pihak. Presiden Santos kemudian mengundang pemimpin-pemimpin negara ke Cartagena untuk menghadiri upacara resmi penandatanganan perjanjian damai antar pemerintah Kolombia dengan FARC (BBC News 2016).

Di tahap terakhir *peacemaking*, dilaksanakan proses ‘detail’ yaitu negosiator atau mediator bertanggung jawab dalam meyakinkan masing-masing pihak yang terlibat bahwa kesepakatan damai tersebut sifatnya menguntungkan. Tahap terakhir dari *peacemaking* antar Kolombia dengan FARC ini pada awalnya tidak berjalan lancar karena perjanjian damai pertama yang telah disetujui kedua pihak ditolak dalam pemilihan umum. Pada Oktober 2016, Perjanjian Cartagena ditolak dengan perbedaan 54.000 suara dari jumlah total 13 juta suara. Tim negosiasi pemerintah

Kolombia dengan tim negosiasi FARC beserta tim mediator kemudian melaksanakan pembicaraan kembali selama 41 hari dalam rangka revisi perjanjian damai ini. Kedua tim akhirnya mengubah beberapa detail dalam 56 kategori dan kemudian menandatangani revisi kesepakatan damai ini. Pada 30 November 2016, Senat Kolombia menyetujui perjanjian damai kedua ini dengan suara 75-0 (dari 101 Senator) lalu disetujui keesokan harinya oleh Majelis Perwakilan dengan suara 130-0 (dari 166 anggota Majelis) (Haugaard 2017).

Proses Peacebuilding antara Pemerintah Kolombia dengan FARC dan Kontribusi Amerika Serikat dalam Proses Tersebut

Proses *peacebuilding* antar pemerintah Kolombia dengan FARC tersebut terbagi menjadi ke dalam empat aspek yaitu penguatan mekanisme pemerintahan dan institusi demokrasi, pengembangan infrastruktur ekonomi beserta penjaminan keamanan dan perwujudan keadilan sosial. Pada awal proses damai antar FARC dengan Kolombia, terdapat dua agenda utama yang dibicarakan yaitu reformasi lahan dan hak politik organisasi FARC. Pada Desember 2013, terbentuk kesepakatan berisi tiga poin penting yaitu keterbukaan atas proses demokratis baru yang mempromosikan inklusi politik sebagai mekanisme konsolidasi perdamaian setelah berakhirnya konflik, meningkatkan partisipasi warga dalam proses konsolidasi perdamaian dan memastikan terputusnya hubungan antar aktor politik dengan militer (Ramirez 2016,6). Hal ini semakin diperjelas dalam perjanjian damai baru (2016) yaitu pemerintah Kolombia membentuk mekanisme bernama *Comprehensive Security System for the Exercise of Politics* yang membahas tentang hak politik pihak oposisi dalam kerangka kerja institusi Kolombia, peningkatan akses publik atas media, perbaikan proses pembentukan partai-partai politik baru, pengawasan warga sipil melalui *Councils for Reconciliation and Coexistence*, keamanan bagi kandidat politik oposisi terutama dari FARC, penjaminan keamanan bagi gerakan maupun organisasi sosial atau kelompok protes, peningkatan partisipasi perempuan dalam arena politik dan peningkatan transparansi dalam pemilihan umum.

Perjanjian tersebut juga memastikan bahwa FARC akan mengalami transformasi menjadi organisasi politik serta menjamin tiga kursi representatif di setiap ruang Kongres namun tanpa hak pilih hingga tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian lima kursi bagi masing-masing senator dan representatif untuk dua periode di pemilihan umum selanjutnya. Pemerintah Kolombia menjanjikan adanya reformasi rezim pemilu yang meliputi upaya promosi

partisipasi pemilihan umum, pemberian edukasi atas mekanisme pemilihan umum bagi warga Kolombia, memberikan bantuan dana bagi proyek radio komunitas, pelaksanaan pelatihan teknis bagi para anggota media yang bekerja dalam bidang pembangunan komunitas dan pemberian dana bagi proyek-proyek yang berfokus dalam menumbuhkan budaya demokrasi rakyat Kolombia (Colombia High Commissioner for Peace 2016).

Di aspek penguatan mekanisme pemerintahan, pemerintah Kolombia dibawah administrasi Uribe pada tahun 2009 meluncurkan *The National Consolidation Plan* (PNC) yaitu kerangka kerja yang mengoordinasikan upaya seluruh komponen pemerintah khususnya di wilayah dimana marginalisasi, kekerasan dan perdagangan narkoba bertemu. Di bawah kekuasaan administrasi Santos, rencana ini diintegrasikan ke dalam kerangka program baru bernama *National Development Plan* (Robinson 2013,48). Amerika Serikat kemudian menunjukkan dukungannya terhadap strategi pemerintah Kolombia ini melalui pembentukan program antar institusi yang dinamakan *Colombia Strategic Development Initiative* (CSDI). Dibawah *Plan Colombia*, Kongres Amerika Serikat juga telah menyediakan sepuluh milyar dolar melalui asistensi bilateral dalam periode FY2000-FY2016 untuk membantu situasi keamanan dan memperkuat demokrasi di Kolombia (Beittel & Rosen 2017,1). Dana ini sebagian besar diatur oleh USAID yang kemudian disalurkan terhadap organisasi-organisasi lokal. Organisasi lain seperti USIP juga menyumbang kontribusi besar dalam mendukung organisasi-organisasi lokal sejak tahun 2011 terutama di aspek pengawasan implementasi deklarasi-deklarasi yang telah terbentuk. USIP juga melatih organisasi-organisasi ini dalam mengembangkan serta mengawasi inisiatif *peacebuilding* mereka.

Di aspek pengembangan infrastruktur ekonomi, Pada Juni 2013, Presiden Santos mengeluarkan kebijakan *Agrarian Development* yang terdiri dari empat poin yaitu akses atas penggunaan lahan, program pengembangan khusus dengan pendekatan teritorial, rencana nasional untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengeliminasi kemiskinan ekstrim serta penciptaan sistem pangan dan gizi khusus bagi rakyat Kolombia (Ramirez 2016,5). Reformasi lahan kemudian dijelaskan secara mendetail dalam perjanjian damai antara FARC dengan pemerintah Kolombia yaitu dibentuknya *Comprehensive Rural Reform* yang berfungsi sebagai fondasi bagi proses transformasi pedesaan Kolombia dengan tujuan penjaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi penduduk desa (Colombia High Commissioner for Peace 2016). Pemerintah Kolombia juga

mengadakan *Land Fund* ditujukan bagi petani yang tidak memiliki lahan atau tidak memiliki lahan yang mencukupi untuk produksi.

Dalam perjanjian damai, pemerintah Kolombia setuju untuk membentuk sistem hukum pertanahan khusus, menciptakan lembaga tingkat tinggi untuk mendefinisikan aturan umum atas penggunaan lahan, mempromosikan partisipasi rakyat dalam penciptaan peraturan teritorial dan pembentukan mekanisme dialog antar pemerintah, komunitas dan perusahaan, menciptakan sistem pendaftaran tanah yang serbaguna, membentuk rencana zonasi lingkungan dengan tujuan membatasi produksi tani serta melindungi wilayah yang memiliki kepentingan ekologis khusus (Colombia High Commissioner for Peace 2016). Di bidang infrastruktur, pemerintah Kolombia telah bekerja sama dengan USAID dalam melaksanakan berbagai program yang meningkatkan kualitas jalan seperti program rekonstruksi jaringan jalan pedesaan, memperluas akses dan meningkatkan kualitas jaringan internet bagi rakyat Kolombia serta memulihkan dan memperluas infrastruktur irigasi maupun sistem drainase.

Di bidang penjaminan keamanan, terdapat dua kepentingan yaitu mengakhiri konflik bersenjata dan memberantas perdagangan obat-obatan terlarang. Pada Maret 2015, pemerintah Kolombia dengan FARC mengumumkan bahwa mereka akan memulai program untuk menghilangkan ranjau darat dan alat-alat peledak lainnya dari wilayah publik (Reuters 2015). Sedangkan di sisi Amerika Serikat, Kongres sesuai dengan perubahan posisinya yang ingin menjauh dari keterlibatan militer kemudian menetapkan batasan pada pengiriman tentara dan bantuan teknis militer. Proses *peacebuilding* terkait isu keamanan ini mencapai titik puncaknya pada November 2016 yaitu saat ditandatangani perjanjian *Definitive Bilateral Ceasefire and Cessation of Hostilities and the Laying Down of Arms* (CFBHD). Tujuan utama perjanjian CFBHD ialah menjamin pemberhentian konflik antar pemerintah Kolombia dengan FARC. Perjanjian CFBHD menyediakan prosedur teknis untuk pendaftaran, identifikasi, pemantauan dan verifikasi kepemilikan, pengumpulan, penyimpanan, ekstraksi dan pembuangan seluruh persenjataan FARC. Perjanjian CFBHD juga mengatur mekanisme operasi MM&V dan membahas mengenai prosedur perpindahan unit-unit FARC ke Zona Lokal Transisional untuk Normalisasi maupun Poin Lokal Transisional untuk Normalisasi. Pemerintah Kolombia juga membentuk *Special Investigation Unit for the Dismantling of Criminal Organizations* yaitu komisi yang bekerja

sama dengan unit-unit penuntut umum lainnya dalam melawan organisasi-organisasi kriminal di Kolombia (Colombia High Commissioner for Peace 2016).

Di isu *counternarcotics*, militer pemerintah Kolombia bekerja sama dengan militer Amerika Serikat dalam memperlemah kendali dan mengurangi pendapatan FARC melalui pelaksanaan operasi-operasi yang menargetkan lahan koka, laboratorium narkoba serta tempat penyimpanan penyelundup obat-obatan ilegal (Otis 2014,6). Dukungan Amerika Serikat terhadap Kolombia melalui pemberian bantuan aset penerbangan, keamanan darat dan pasukan polisi ini telah menjadi salah satu faktor penting dalam membantu pemerintah Kolombia memperluas keberadaannya terutama di wilayah-wilayah konflik atau wilayah dimana tanaman obat terlarang diproduksi.

Pemerintah Kolombia dengan FARC secara resmi memulai diskusinya mengenai isu narkoba pada November 2013 dan proses negosiasi tersebut mencapai titik puncaknya pada 16 Mei 2014 yaitu penandatanganan perjanjian parsial yang dinamakan "*The Solution to the Problem of Illicit Drugs*". Perjanjian ini memiliki tiga poin utama yaitu substitusi terhadap eradikasi tanaman koka dan tanaman obat-obatan lainnya, kesehatan publik dan konsumsi obat-obatan serta solusi terhadap isu produksi dan peredaran narkoba di Kolombia (Beittel & Rosen 2017,5). Pemerintah Kolombia kemudian membentuk inisiatif baru bernama *National Integral Program for the Substitution of Ilicit Crops* (PNIS) dengan tujuan mewujudkan transformasi struktural di wilayah-wilayah penanaman tanaman obat-obatan terlarang melalui produksi substitusi tanaman yang sifatnya berkelanjutan dan penciptaan program-program pembangunan alternatif (Colombia High Commissioner for Peace 2016).

Pada Oktober 2015, pemerintah Kolombia menghentikan operasi penyemprotan lahan koka dan memulai implementasi pendekatan kesehatan publik dalam melawan perdagangan obat-obatan terlarang (Beittel & Rosen 2017,7). Pemerintah Kolombia kemudian membentuk program-program tingkat tinggi dengan tugas untuk memandang masalah narkoba ini sebagai masalah kesehatan publik, melaksanakan revisi serta mengkoordinasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan konsumsi obat-obatan terlarang. Kedua program yang terbentuk antara lain *National Attention System for Illicit Drug Users* dan *National Programme for Comprehensive Intervention into Drug Use* (Colombia High Commissioner for Peace 2016).

Poin terakhir dari perjanjian damai terkait isu narkoba tersebut berkaitan dengan upaya perlawanan melawan organisasi-organisasi kriminal pengedar narkoba di Kolombia. Pemerintah Kolombia pada akhirnya mengeluarkan strategi komprehensif untuk memberantas korupsi yang terkait dengan jual beli narkoba dari lembaga-lembaga negara, menghentikan pencucian uang, menyita aset para penyelundup narkoba dan membentuk sistem kontrol terhadap bahan-bahan kimia yang diperlukan dalam membuat kokain maupun obat-obatan terlarang lainnya. Pemerintah Kolombia juga menetapkan kebijakan kriminal baru untuk memperkuat serta menghubungkan berbagai entitas, mekanisme dan kapasitas penyelidikan maupun penuntutan di skala nasional atau regional (Colombia High Commissioner for Peace 2016).

Dari sisi Amerika Serikat sendiri, USAID telah mendukung berbagai program *peacebuilding* pemerintah Kolombia di isu melawan narkoba terutama dalam program *consolidation and livelihoods* di 40 kota yang paling terkena dampak konflik. USAID secara langsung membantu pemerintah Kolombia dalam melaksanakan rencana *National Development* di 40 kota tersebut. Pada periode FY2017, Kongres menyetujui *Consolidation Appropriations Act* (P.L.115-31) yaitu regulasi yang mendanai program *Peace Colombia* dengan penyediaan dana sebesar 391,3 juta dolar (Beittel 2018,34).

Di aspek perwujudan keadilan sosial, perjanjian damai yang telah terbentuk membahas mengenai upaya reparasi dan reintegrasi para korban konflik maupun anggota FARC. Tugas utama pemerintah Kolombia pada dasarnya ialah mempromosikan, melindungi, menghormati dan menjamin hak atas perdamaian tidak hanya bagi korban yang tinggal di zona-zona konflik namun juga anggota FARC yang terbukti tidak bersalah di mata hukum. FARC sendiri menjamin organisasinya yang telah berkembang menjadi entitas politik akan selalu menegakkan hak asasi manusia dan memastikan anggota-anggotanya untuk menghormati hak kebebasan individu maupun mempromosikan perwujudan keadaan sosial yang damai di Kolombia (Colombia High Commissioner for Peace 2016).

Pada November 2015, ditandatangani perjanjian antara FARC dengan pemerintah Kolombia yang menjelaskan mengenai pentingnya pengakuan terhadap penderitaan korban dan tanggung jawab negara terhadap korban, pemenuhan hak-hak korban, partisipasi korban, penjelasan kebenaran atas situasi korban, reparasi korban dan menjamin perlindungan korban, jaminan atas tidak terulangnya konflik serupa (*guarantees of non repetition*), prinsip rekonsiliasi dan aplikasi

pendekatan berbasis hak asasi dalam menyelesaikan konflik (Ramirez 2016,7). Presiden Santos juga mengumumkan pembentukan berbagai inisiatif atau komisi terkait isu reparasi korban seperti *Truth, Coexistence and Non Repetition Commission*, *Special Jurisdiction for Peace* dan *Special Unit for the Search for persons Missing in the Context of and due to Armed Conflict* (Colombia High Commissioner for Peace 2016).

Di sisi lain, pembicaraan mengenai reparasi korban dalam konteks keadilan restoratif tidak dapat lepas dari isu amnesti. Amnesti memberikan insentif bagi para anggota FARC untuk menyediakan informasi mengenai sejarah kriminal mereka dengan imbalan pengurangan hukuman atau hukuman alternatif. Hal ini dilakukan supaya dapat terjadi reparasi bagi korbannya terkait pemenuhan hak kebenaran dan keadilan. Amnesti yang ditawarkan oleh pemerintah Kolombia terhadap anggota FARC ini hanya berlaku pada tindakan kejahatan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemberontakan (Colombia High Commissioner for Peace 2016). Sedangkan amnesti tidak akan diberikan bagi pelaku tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang serius, penyanderaan dan perampasan hak kebebasan individu lainnya seperti penculikan warga sipil, penyiksaan, eksekusi ekstra yudisial, pemindahan paksa warga sipil, perekrutan anak dibawah umur dan kejahatan seks.

Di isu penegakan hak asasi ini, administrasi Obama pada tahun 2014 memperluas batasan dari *Leahy Law* yaitu melarang pemberian bantuan pelatihan, alat atau bantuan alternatif lainnya apabila terdapat informasi kredibel bahwa pihak penerima asing telah melaksanakan pelanggaran hak asasi manusia (Beittel 2018,35). Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Amerika Serikat di negara penerima bantuan kemudian bertanggung jawab untuk melakukan review atau memeriksa apakah pihak penerima bantuan tersebut bersalah atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dituduh. Institusi Amerika Serikat lain juga berkontribusi seperti USIP yang mendorong pemerintah Kolombia untuk menggunakan pendekatan berbasis kesetaraan dan perspektif gender dengan fokus pada hak perempuan dalam proses reparasi korbannya.

Kesimpulan

Tujuan Kolombia dan Amerika Serikat memang berbeda dalam beberapa aspek namun terdapat tumpang tindih kepentingan yang signifikan yaitu pencapaian perdamaian, penjaminan kesejahteraan serta pemberantasan perdagangan obat-obatan terlarang. Interdependensi antara

kedua negara ini juga dapat dilihat melalui upaya perdamaian antara pemerintah Kolombia dan FARC dengan Amerika Serikat memiliki peran penting dalam proses *peacemaking* dan *peacebuilding* kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Obama berhasil membantu perwujudan konsolidasi perdamaian antara FARC dengan pemerintah Kolombia.

Tulisan ini juga memaparkan perbedaan-perbedaan dalam implementasi kebijakan asing Amerika Serikat atas isu Kolombia oleh masing-masing Presiden. Sebelum Obama dilantik sebagai Presiden, pemerintah Amerika Serikat cenderung membingkai *Plan Colombia* sebagai inisiatif anti narkotika sehingga Kolombia serta Amerika Serikat terlalu berfokus pada upaya militer dan bantuan polisi. Kesimpulan pertama tulisan ini adalah kebijakan asing terkait isu Kolombia yang dilaksanakan melalui *Plan Colombia* pada era sebelum Presiden Obama cenderung menghiraukan isu-isu lainnya yang tidak kalah penting bagi masyarakat Kolombia seperti hak asasi korban, keadilan transisional maupun hak partisipasi politik bagi FARC. Kebijakan neoliberal dan *over-militerization* konflik ini secara tidak langsung menyebabkan sentralisasi negara, menyusutkan kebebasan masyarakat sipil dan meningkatkan oposisi publik terhadap pemerintah pusat. Sedangkan Presiden Obama sejak masa kampanyenya selalu menjanjikan Amerika Serikat yang lebih non-militeristik dan memprioritaskan diplomasi atau negosiasi dalam menyelesaikan suatu konflik.

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Obama selalu mendukung upaya *peacemaking* antara pemerintah Kolombia dengan FARC terutama dengan perannya sebagai mediator dalam proses negosiasi. Proses *peacemaking* terbagi menjadi tiga tahap dasar yaitu tahap diagnosis kepentingan masing-masing pihak, tahap formulasi yaitu proses negosiasi dan mediasi serta tahap detail yaitu penjaminan kepuasan masing-masing pihak terhadap kesepakatan damai yang telah terbentuk. Proses pembicaraan antara pemerintah Kolombia dengan FARC resmi dimulai pada tahun 2012 dan berlanjut selama empat tahun dengan titik puncaknya pada November 2016 yaitu ratifikasi perjanjian damai oleh Kongres Kolombia. Amerika Serikat mengambil peran sebagai mediator dan membantu mempengaruhi pandangan pemerintah Kolombia di isu-isu seperti inklusi gender maupun kelompok minoritas dalam pembicaraannya dengan FARC. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa Amerika Serikat dalam perannya sebagai mediator memiliki mandat fleksibel untuk tidak hanya melakukan mediasi aktif namun juga

melaksanakan *capacity-building*, membangun kepercayaan, mengatur logistik maupun membantu menyelesaikan konflik yang muncul selama proses negosiasi.

Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan upaya *counterinsurgency* di masa modern tidak hanya membutuhkan komponen militer namun juga komponen ekonomi, sosial dan politik yang kuat untuk dapat bertahan di jangka panjang. Tulisan ini kemudian menyimpulkan bahwa proses *peacebuilding* antara pemerintah Kolombia dengan FARC pada dasarnya direfleksikan dalam implementasi *Plan Colombia*. *Plan Colombia* memiliki empat komponen yaitu eradikasi tanaman obat-obat terlarang, perkembangan alternatif, perkembangan ekonomi dan keamanan demokrasi. Amerika Serikat membantu melalui pemberian bantuan dana dan bantuan teknis atau bekerja sama langsung dengan Kolombia dalam program-program yang berkaitan dengan empat komponen tersebut.

keberhasilan Presiden Obama dalam membantu upaya konsolidasi perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC ini bergantung pada faktor-faktor tertentu dari pergeseran pandangan Amerika Serikat yang menjauhkan dirinya dari ketergantungan pada militer sebagai solusi konflik sehingga lebih menempatkan posisinya sebagai pengamat atau mediator dalam proses *peacemaking* dan perubahan prioritas alokasi dana *Plan Colombia* dari *counterterrorism* menjadi lebih fokus pada bantuan kemanusiaan. Implementasi *Plan Colombia* dibawah administrasi Obama merupakan demonstrasi atas bagaimana Amerika Serikat dapat mencapai tujuan keamanannya dengan investasi militer yang terbatas. Sejak tahun 2009, administrasi Obama telah memperketat anggaran dana, mengubah fokus implementasi *Plan Colombia* dan memperbolehkan inisiatif-inisiatif yang didanai Amerika Serikat kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Kolombia paska konflik.

Daftar Pustaka

- Acosta, Luis. 2016. *Secret Mediator Helped Guide Colombia to Peace Deal* [Online] Tersedia dalam <https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels-mediator/secret-mediator-helped-guide-colombia-to-peace-deal-idUSKCN11S23X> (Diakses pada 10 Agustus 2019).
- Beittel, June. 2016. *Colombia Adopts Revised Peace Accord: What Next?* Washington DC: Congressional Research Report.
- Beittel, June. 2018. *Colombia: Background and US Relations*. Washington DC: Congressional Research Report.

- BBC News. 2016. *Colombia peace deal: Historic agreement is signed* [Online] Tersedia dalam <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37477202> (Diakses pada 10 Agustus 2019).
- Carlin, John. 2016. *Gunslingers for Peace* [Online] Tersedia dalam https://elpais.com/elpais/2016/09/27/inenglish/1474974728_952141.html (Diakses pada 10 Agustus 2019).
- Colombia High Commissioner for Peace. 2016. *Colombia's Agreement to End Conflict and Build Peace* [Online] Tersedia dalam <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/summary-of-colombias-peace-agreement.pdf> (Diakses pada 7 Agustus 2018).
- Haugaard, Lisa, Adam Isacson & Joy Olson. 2005. *Erasing the Lines: Trends in US Military Programs with Latin America*. Washington DC: Center for International Policy.
- Haugaard, Lisa. 2017. *Peace Accord Implementation Begins in Colombia: FARC Guerrillas Enter Concentration Zones*. Latin America Working Group Policy Brief. Mordogan 2007
- Murphy, Helen dan Luis Acosta. 2013. *Colombia President Says Government Ready for Peace Talks with ELN Rebel* [Online] Tersedia dalam <https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels-eln/colombia-president-says-government-ready-for-peace-talks-with-eln-rebels-idUSBRE97S03S20130829> (Diakses pada 22 Juni 2018).
- Nylander, Dag, Rita Sandberg dan Idun Tvedt. 2018. *Designing Peace: the Colombian Peace Process*. Norwegia: NOREF Report.
- Otis, John. 2014. *The FARC and Colombia's Illegal Drug Trade*. Washington DC: Wilson Center Latin American Program.
- Otis, John. 2016. *Colombia's President: Making Peace with Rebels Is 'A Good Investment'* [Online] Tersedia dalam <https://www.wbur.org/npr/483976526/colombias-president-making-peace-with-rebels-is-a-good-investment> (Diakses pada 22 Juni 2018).
- Quintana, Ana. 2016. *The Colombian-FARC Peace Deal: Why It Failed and How the US Can Support a Responsible Renegotiation*. Washington DC: The Heritage Foundation.
- Ramirez, Enrique. 2016. *The Colombian People Say No to the Peace Agreement but Hopes for a Solution Remain*. European Union: European Parliamentary Research Service.
- Reuters. 2015. *Colombia government and FARC rebels agree to remove landmines* [Online] Tersedia dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/08/colombia-government-and-farc-rebels-agree-to-remove-landmines> (Diakses pada 5 September 2019).
- Strasser, Fred. 2016. *Q&A: Colombia Peace Deal Announced-What's Next?* [Online] Tersedia dalam <https://reliefweb.int/report/colombia/qa-colombia-peace-deal-announced-what-s-next> (Diakses pada 22 Juni 2018).

US Department of State. 2015. US Relations with Colombia [Online] Tersedia dalam <http://www.state.gov/u-s-relations-with-colombia/> (Diakses pada 10 Mei 2018).

Veillette, Connie. 2016. *Colombia's Peace Process through 2016*. Washington DC: The Library of Congress.

